

Akuntabilitas Keuangan Sekolah Berbasis Audit Keuangan Studi Kasus SD Negeri 16 Buton

Sitti Sahra Siolimbona^{1*}, Rusdin²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan dana sekolah untuk mewujudkan transparansi dan tanggung jawab dalam pemanfaatan anggaran pendidikan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan akuntabilitas keuangan berbasis audit keuangan di Sekolah Dasar Negeri 16 Buton. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Populasi penelitian berjumlah 17 orang, dengan sampel sebanyak 5 orang yang terdiri atas kepala sekolah, komite sekolah, bendahara sekolah, guru, dan staf administrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Dasar Negeri 16 Buton telah melaksanakan akuntabilitas keuangan dengan baik, yang tercermin dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah, pencatatan transaksi yang rinci, serta adanya audit eksternal untuk memastikan ketepatan penggunaan dana. Selain itu, perencanaan penggunaan dana dilakukan melalui musyawarah bersama pihak sekolah dan komite sehingga menghasilkan prioritas kebutuhan yang disepakati. Pelaksanaan dan penatausahaan dana Bantuan Operasional Sekolah juga sesuai prosedur, dengan pelaporan yang transparan serta pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 16 Buton telah berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Akuntabilitas keuangan, Dana BOS

Abstract: This research was motivated by the importance of financial accountability in the management of school funds to ensure transparency and responsibility in the use of educational budgets. The purpose of this study was to examine the implementation of financial accountability based on financial audits at Public Elementary School 16 Buton. The study employed a qualitative approach with a descriptive method. The population consisted of 17 individuals, while the sample included 5 participants, namely the principal, school committee, school treasurer, teacher, and administrative staff. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that Public Elementary School 16 Buton has implemented financial accountability effectively, as reflected in the preparation of the School Work and Budget Plan, detailed transaction records, and external audits to ensure the accuracy of fund utilization. Furthermore, the planning of fund allocation was carried out through discussions between the school and the committee to determine priority needs, which were then documented in the budget plan. The implementation and administration of the School Operational Assistance funds were also conducted in accordance with applicable procedures, with transparent reporting and clear accountability. In conclusion, the management of the School Operational Assistance funds at Public Elementary School 16 Buton has been carried out in an accountable manner and in compliance with existing regulations.

Keywords: *Financial accountability, BOS funds*

1. Pendahuluan

Sekolah Dasar Negeri 16 Buton merupakan salah satu sekolah dasar di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah. Dalam perjalanannya, sekolah ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama akibat pemekaran wilayah, dari semula bernama SD Negeri 1 Kombeli, kemudian menjadi SD Negeri 1 Takimpo pada tahun 2006, hingga akhirnya ditetapkan menjadi SD Negeri 16 Buton pada tahun 2019 melalui keputusan Bupati Buton. Sebagai lembaga pendidikan dasar, sekolah ini memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat setempat, termasuk dalam hal pengelolaan biaya pendidikan.

Pembiayaan pendidikan merupakan faktor kunci dalam keberlangsungan proses belajar mengajar, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pengelolaannya harus berlandaskan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (Widyatmoko, 2017:155). Pengelolaan dana yang akuntabel tidak hanya bertujuan untuk mendukung kelancaran proses pendidikan, tetapi juga mencegah penyimpangan dana dan memastikan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat dan pemerintah (Febriyanti & Devi, 2022:345). Hasil observasi awal di SD Negeri 16 Buton menunjukkan masih adanya kendala dalam perencanaan dan realisasi anggaran. Kurangnya pemahaman dan kapasitas dalam pengelolaan dana menyebabkan beberapa indikator akuntabilitas keuangan belum berjalan optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tata kelola keuangan sekolah yang diidealkan dalam regulasi dengan praktik nyata di lapangan.

Kesenjangan yang muncul dalam akuntabilitas keuangan sekolah pada dasarnya terletak pada perbedaan antara regulasi ideal yang sudah diatur dalam pedoman teknis pengelolaan dana pendidikan dengan praktik sehari-hari di lapangan. Di SD Negeri 16 Buton, pengelolaan dana sekolah seperti dana BOS, iuran komite, maupun bantuan pemerintah daerah sering kali masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek tanpa diimbangi dengan sistem pencatatan yang sistematis sesuai standar audit keuangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman sebagian besar guru maupun staf administrasi terhadap konsep akuntansi publik, khususnya dalam penyusunan laporan yang berbasis transparansi, akurasi, dan akuntabilitas. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan dalam hal penyajian laporan keuangan yang semestinya bisa diakses dan dipahami dengan mudah oleh orang tua murid, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Jika kesenjangan ini tidak diatasi, kepercayaan publik terhadap sekolah dapat menurun, karena masyarakat tidak memiliki bukti yang jelas mengenai penggunaan anggaran sekolah untuk menunjang mutu pembelajaran.

Tantangan yang dihadapi sekolah semakin kompleks karena selain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi pendidikan, juga terdapat kendala dalam hal sarana pendukung. Misalnya, masih minimnya pemanfaatan sistem informasi berbasis digital untuk pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga laporan masih banyak dikerjakan secara manual yang berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan maupun keterlambatan dalam penyusunan laporan. Masalah lainnya adalah kurangnya kesadaran seluruh pemangku kepentingan sekolah mengenai pentingnya keterbukaan informasi keuangan. Tidak jarang, laporan keuangan hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif kepada dinas pendidikan tanpa adanya upaya untuk menyosialisasikan secara rinci kepada orang tua murid atau masyarakat. Dampak dari kondisi ini sangat signifikan, mulai dari potensi salah alokasi anggaran, keterlambatan pelaksanaan program pembelajaran karena dana tidak terserap secara efektif, hingga

turunnya kredibilitas sekolah sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk mengelola dana pendidikan anak-anak mereka.

Solusi yang dapat ditawarkan tidak hanya sebatas pada perbaikan teknis pencatatan, melainkan juga mencakup strategi peningkatan kapasitas dan budaya transparansi di lingkungan sekolah. Salah satu langkah konkret adalah mengadakan pelatihan rutin bagi bendahara sekolah dan tim administrasi mengenai akuntansi pendidikan yang sesuai standar audit keuangan. Selain itu, pendampingan dari auditor independen atau pengawas sekolah dapat menjadi instrumen pengendali untuk memastikan bahwa laporan benar-benar sesuai standar. Penerapan sistem informasi manajemen keuangan berbasis digital yang transparan dan terhubung dengan pihak komite sekolah serta orang tua murid juga bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Penelitian dengan judul *Akuntabilitas Keuangan Sekolah Berbasis Audit Keuangan Studi Kasus SD Negeri 16 Buton* menjadi sangat menarik untuk dilakukan karena tidak hanya menyajikan analisis terhadap persoalan nyata yang terjadi di tingkat sekolah dasar, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam upaya memperkuat tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi sekolah lain di wilayah pedesaan maupun perkotaan yang menghadapi permasalahan serupa, sehingga mendorong terciptanya budaya akuntabilitas publik dalam dunia pendidikan dasar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 16 Buton yang beralamat di Jalan Poros Wabula, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan sekolah yang berjumlah 17 orang, meliputi kepala sekolah, bendahara, guru, dan staf administrasi. Dari jumlah tersebut, dipilih lima orang sebagai sampel dengan teknik purposive sampling, yakni kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah, guru, dan staf administrasi, serta dokumen laporan keuangan tahun 2023, karena dianggap paling relevan dan memahami pengelolaan keuangan sekolah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi terhadap aktivitas pengelolaan keuangan, wawancara dengan informan kunci, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Data sekunder berupa arsip sekolah, peraturan pemerintah, serta literatur yang mendukung kajian akuntabilitas keuangan sekolah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai proses pengelolaan keuangan di SD Negeri 16 Buton, mulai dari pencatatan, penyusunan laporan, hingga mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak sekolah. Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam dari berbagai informan, seperti kepala sekolah, bendahara, guru, maupun komite sekolah, sehingga peneliti dapat memahami dinamika, kendala, serta strategi yang ditempuh dalam praktik akuntabilitas keuangan. Selain itu, dokumentasi dimanfaatkan untuk mengkaji arsip-arsip keuangan, laporan penggunaan dana BOS, notulen rapat, serta dokumen administrasi lain yang relevan guna memperkuat data observasi dan wawancara.

Data yang terkumpul dari ketiga teknik tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan merangkum informasi penting sesuai fokus penelitian, sementara penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara

memverifikasi temuan secara berulang hingga diperoleh data yang jenuh dan konsisten. Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga akhir penelitian, sehingga hasil yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SD Negeri 16 Buton, akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai sudah berjalan dengan baik dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa aspek utama:

Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran Dana BOS di SD Negeri 16 Buton dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis agar penggunaannya tepat sasaran. Proses ini dimulai dengan melakukan identifikasi kebutuhan sekolah, baik yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, pengadaan sarana-prasarana, maupun pengembangan kapasitas guru. Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui rapat bersama yang melibatkan kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan perwakilan komite sekolah, sehingga rencana anggaran yang disusun benar-benar merefleksikan prioritas utama yang diperlukan oleh sekolah. Dengan demikian, perencanaan ini tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi pedoman strategis dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Selanjutnya, hasil identifikasi kebutuhan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat rincian program, kegiatan, serta estimasi biaya yang dibutuhkan. RKAS ini disusun sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga penggunaannya tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku. Dalam penyusunan RKAS, pihak sekolah juga mempertimbangkan efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan atau alokasi yang tidak relevan dengan kebutuhan. Proses ini juga memastikan bahwa setiap rupiah dana yang dikelola memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

Tahapan berikutnya adalah pembahasan dan validasi RKAS melalui rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder sekolah. Rapat ini berfungsi sebagai forum transparansi, di mana setiap pihak dapat memberikan masukan, kritik, maupun saran terkait dengan perencanaan anggaran. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan serta untuk menumbuhkan rasa memiliki dari seluruh komponen sekolah terhadap penggunaan Dana BOS. Validasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap komponen anggaran benar-benar sesuai dengan aturan dan kebutuhan prioritas sekolah. Dengan adanya keterlibatan aktif berbagai pihak, perencanaan anggaran dapat berjalan lebih akuntabel dan terhindar dari potensi penyalahgunaan. Setelah perencanaan anggaran disahkan, dokumen RKAS tersebut dijadikan sebagai pedoman utama dalam pengelolaan dan pelaporan Dana BOS sepanjang tahun anggaran berjalan. RKAS tidak hanya menjadi acuan administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengendali untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan awal. Jika dalam perjalanan terdapat perubahan kebutuhan atau kendala yang tidak terduga, sekolah dapat melakukan revisi RKAS sesuai prosedur yang berlaku, dengan tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, perencanaan anggaran Dana BOS di SD Negeri 16 Buton tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya guna.

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 16 Buton dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini diawali dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun dan disahkan sebelumnya. Setiap program yang menggunakan Dana BOS harus mengacu pada rencana tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan. Dalam tahap ini, bendahara sekolah berperan sebagai penanggung jawab utama yang memastikan semua transaksi keuangan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari pembelian barang, pembayaran jasa, hingga pendanaan kegiatan pembelajaran.

Penatausahaan keuangan dilakukan secara sistematis dengan mencatat setiap transaksi pengeluaran ke dalam pembukuan resmi sekolah. Pencatatan ini tidak hanya berupa jumlah uang yang dikeluarkan, tetapi juga dilengkapi dengan keterangan penggunaan, tanggal transaksi, serta pihak yang terlibat. Setiap transaksi wajib disertai bukti-bukti pendukung seperti kuitansi, nota, faktur, atau surat perjanjian yang sah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari potensi terjadinya kesalahan pencatatan atau bahkan penyalahgunaan dana. Dengan demikian, setiap penggunaan Dana BOS dapat dilacak secara jelas dan detail ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak pengawas atau auditor. Selain pencatatan manual dalam buku kas umum, pihak sekolah juga memanfaatkan format laporan yang sudah ditetapkan dalam juknis BOS. Format ini membantu memastikan bahwa seluruh aspek penggunaan dana terdokumentasi secara rapi dan sesuai dengan standar pelaporan. Penatausahaan dilakukan secara berkala, misalnya setiap bulan, sehingga memudahkan sekolah dalam melakukan evaluasi sementara terhadap realisasi anggaran. Dengan penyusunan laporan secara berjenjang, sekolah dapat memantau sejauh mana program-program yang direncanakan telah berjalan serta menyesuaikan penggunaan anggaran jika terdapat kebutuhan yang berubah.

Transparansi dalam pelaksanaan dan penatausahaan juga ditunjukkan dengan adanya pelibatan stakeholder sekolah, terutama komite dan orang tua murid, dalam proses pemantauan. Hasil pencatatan keuangan dapat dipublikasikan dalam rapat sekolah atau ditempelkan di papan pengumuman agar dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Praktik ini menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana BOS karena semua pihak dapat mengetahui alur penggunaan dana secara jelas. Dengan mekanisme yang transparan, terstruktur, dan terdokumentasi, pelaksanaan serta penatausahaan keuangan di SD Negeri 16 Buton tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun integritas serta akuntabilitas lembaga pendidikan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan keuangan di SD Negeri 16 Buton dilaksanakan secara teratur sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas publik. Bendahara sekolah bertanggung jawab penuh dalam menyusun laporan penggunaan Dana BOS berdasarkan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Setiap laporan dibuat secara rinci, jelas, dan sesuai dengan format standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga memudahkan pihak berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi. Dalam laporan tersebut, tercantum rincian pengeluaran yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah, seperti kuitansi, nota pembelian, dan daftar hadir kegiatan. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, laporan menjadi lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

Pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS tidak hanya berhenti pada penyusunan laporan internal, tetapi juga melibatkan mekanisme pelaporan eksternal. Laporan yang telah disusun oleh bendahara disampaikan kepada dinas pendidikan sebagai lembaga pengawas serta kepada komite sekolah sebagai representasi masyarakat. Hal ini mencerminkan

adanya prinsip transparansi dan partisipasi publik, karena orang tua siswa dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana yang diterima sekolah dikelola dan dimanfaatkan. Proses ini juga menjadi sarana evaluasi bersama untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan prioritas pendidikan. Selain itu, laporan keuangan sekolah juga menjadi bahan audit internal maupun eksternal. Auditor atau tim pengawas dapat menilai sejauh mana tata kelola keuangan sekolah sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Jika ditemukan kekeliruan atau kelemahan dalam pencatatan, pihak sekolah akan diberikan masukan untuk melakukan perbaikan di periode berikutnya. Dengan cara ini, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak hanya menjadi kewajiban administratif semata, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran kelembagaan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sekolah. Hal ini sejalan dengan semangat *good governance* yang menekankan pada akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan dana publik.

Transparansi laporan juga didukung dengan upaya publikasi hasil pertanggungjawaban keuangan di lingkungan sekolah. Beberapa sekolah, termasuk SD Negeri 16 Buton, menempelkan ringkasan laporan penggunaan Dana BOS di papan pengumuman atau menyampaikan dalam forum rapat dengan orang tua murid. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat serta memperkuat citra sekolah sebagai lembaga pendidikan yang terbuka dan bertanggung jawab. Dengan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik, Dana BOS benar-benar dapat digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan mutu pendidikan dasar. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa SD Negeri 16 Buton telah menerapkan praktik akuntabilitas keuangan yang kuat dalam pengelolaan Dana BOS, dari tahap perencanaan hingga pelaporan, yang memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan dan kebutuhan sekolah.

3.2 Pembahasan

Pembahasan penelitian ini dimaksudkan untuk memaknai hasil temuan dengan mengaitkannya pada teori dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di SD Negeri 16 Buton telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas yang mencakup integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan. Transparansi terlihat dari penyusunan RKAS secara partisipatif, pencatatan transaksi keuangan yang rinci, serta pelaporan yang terbuka kepada komite sekolah dan pihak terkait. Ketaatan terhadap peraturan juga diterapkan melalui kepatuhan terhadap juknis BOS, standar harga, serta kewajiban perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa sekolah mampu mewujudkan pengelolaan dana publik yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil ini sesuai dengan teori akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:30) yang menyatakan bahwa lembaga publik wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada masyarakat dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, temuan ini menguatkan teori keagenan yang menekankan hubungan antara agen (sekolah) dan prinsipal (pemerintah serta masyarakat), di mana agen berkewajiban melaporkan penggunaan dana secara jujur dan terbuka. Penerapan prinsip *good governance* melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi juga tampak nyata di sekolah ini.

Penelitian ini juga konsisten dengan temuan Julantika, Supatmoko, dan Kurrohman (2017:112) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah dasar diwujudkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang transparan. Selanjutnya, penelitian Izzah dan Yanto (2018:57) menegaskan bahwa penyusunan RKAS dan adanya audit internal menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas dana BOS. Hasil penelitian Nikmatuniayah, Yudhaningsi, dan Mardiana (2020:21) juga menekankan pentingnya model pelaporan keuangan berbasis akuntabilitas untuk mencegah

penyimpangan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat hasil-hasil terdahulu dan menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan sekolah bukan hanya sebatas kewajiban administratif, melainkan instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas keuangan di SD Negeri 16 Buton telah berjalan dengan baik melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mencakup tiga aspek utama, yaitu integritas, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan. Dari sisi integritas, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, sementara laporan keuangan diaudit secara rutin sebagai bentuk komitmen menjaga kejujuran dan mencegah penyimpangan dana. Dari aspek pengungkapan, setiap transaksi keuangan dicatat secara rinci sesuai prosedur yang ditetapkan, meskipun masih dilakukan secara manual namun tetap efektif dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Sementara itu, ketaatan terhadap peraturan diwujudkan dengan pencatatan transaksi sesuai prosedur, pemenuhan kewajiban pajak melalui sistem online, serta adanya pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensi tim keuangan dalam administrasi digital. Khusus pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), seluruh tahapan dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dilaksanakan secara transparan dan sesuai regulasi, dimulai dari musyawarah kebutuhan prioritas, pelaksanaan berdasarkan petunjuk teknis dan standar harga, hingga pelaporan berkala yang terdokumentasi dengan baik. Proses ini diawasi secara ketat oleh komite sekolah dan diaudit oleh auditor eksternal sehingga seluruh pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat.

Daftar Pustaka [Tahoma 12pt]

- Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andiawati. (2017). *Manajemen Keuangan Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Boston: Pearson.
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagus Setiawan, & Shaleh. (2023). Akuntabilitas lembaga pendidikan dalam pelaporan keuangan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(2), 170–180.
- Dalimunte, A. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(1), 12–20.
- Endahwati, S. (2014). Akuntabilitas manajemen pendidikan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 20–30.
- Hery. (2017). *Auditing dan Asurans: Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional*. Jakarta: Grasindo.
- Izzah, N., & Yanto. (2018). Analisis pengelolaan dana BOS pada SMK Nurul Hikmah. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 55–63.
- Julantika, A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDN Pringgowirawan 02 Jember. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 4(2), 109–117.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Masyitah. (2019). Indikator akuntabilitas finansial dalam pengelolaan dana publik. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 7(3), 180–190.
- Nikmatuniayah, N., Yudhaningsi, S., & Mardiana, I. (2020). Akuntabilitas pelaporan keuangan desa berbasis shariate enterprise theory. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 18–29.
- Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022. Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP dan BOS. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryan Widati. (2017). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. *Jurnal Ekonomi Publik*, 12(3), 380–390.
- .